

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2016**

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa yang menjadi Badan Kepegawaian Daerah Melaksanakan penunjang urusan kepegawaian.

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 14.284.340.885,- yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.750.713.885,-

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 5.122.590.885,-
- Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 1.628.123.000,-

b. Belanja Langsung : Rp. 7.533.627.000,-

Terdiri dari : 6 Program dan 56 Kegiatan.

Program yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Jumlah dana yang disediakan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.903.598.800,-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.057.739.500,-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.081.000,-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.850.000,-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	335.325.000,-
6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	3.170.032.700,-
Total	7.533.627.000,-

KEGIATAN TAHUN 2016

Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.903.598.800,-
1 Penyediaan jasa surat menyurat	32.115.000,-
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	343.468.000,-
3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.750.000,-
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	130.000.000,-
5 Penyediaan alat tulis kantor	55.559.300,-
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72.483.000,-
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.623.500,-
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.105.923.000,-
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.926.000,-

10	Penyediaan makanan dan minuman	30.400.000,-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	809.507.000,-
12	Penyediaan jasa Sopir Kantor	77.232.000,-
13	Penyediaan jasa pengaman kantor	179.712.000,-
14	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	16.500.000,-
15	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	16.400.000,-
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.057.739.500,-
1	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	422.900.000,-
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.000.000,-
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	28.600.000,-
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.250.000,-
6	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	30.250.000,-
7	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi Jaringan	26.000.000,-
8	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Aset SKPD	63.582.000,-
9	Penataan dan Pengelolaan Arsip	14.084.000,-
10	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	374.073.500,-
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur		42.081.000,-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	42.081.000,-
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		24.850.000,-
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	24.850.000,-
V Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		335.325.000,-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	29.512.000,-
2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	41.988.000,-
3	Penatausahaan Keuangan SKPD	263.825.000,-
VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		3.170.032.700,-
1	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS	333.871.950,-

2	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS	71.338.600,-
3	Pengelolaan mutasi jabatan	175.257.100,-
4	Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN	282.653.250,-
5	Pemindahan dan penempatan PNS	64.899.000,-
6	Pembinaan Jabatan Fungsional PNS	33.100.000,-
7	Pemetaan Potensi Pegawai	160.703.400,-
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	254.120.500,-
9	Penilaian Kinerja Aparatur	120.238.250,-
10	Bimbingan Teknis Kepegawaian	72.629.750,-
11	Ujian Dinas Tingkat I dan Tk.II	19.380.000,-
12	Seleksi ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS	96.964.300,-
13	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas	64.527.500,-
14	Pemberian tanda kehormatan satya lencana karya satya	61.333.000,-
15	Pengelolaan dan pemberian bantuan pendidikan aparatur	523.884.000,-
16	Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	97.616.000,-
17	Penataan dan Pengelolaan Dokumen/Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	68.939.750,-
18	Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai	44.580.000,-
19	Pengelolaan SK CPNS, PNS dan Honorer Pemprov. Sumatera Barat	54.320.000,-
20	Pengelolaan tata naskah dan Pemutakhiran Database kepegawaian daerah	145.341.000,-
21	Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar	85.637.000,-
22	Rapat Koordinasi Kepegawaian	70.791.350,-
23	Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS	29.850.000,-
24	Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)	42.521.000,-
25	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja	41.923.000,-
26	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)	153.613.000,-

2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 2.903.598.800,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 2.728.037.898,- atau 98,12%.

Kelebihan Dana pada program ini sebagian besar pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam rangka efisiensi anggaran.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi bidang kepegawaian. Kegiatan ini memfasilitasi mekanisme persuratan, mulai dari surat masuk hingga surat keluar.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 32.115.000,- dan terealisasi sebesar Rp 29.526.710,- atau capaian kinerja keuangan 91,94%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, air, telepon dan internet melalui jasa pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 343.486.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 302.414.551,- atau capaian kinerja keuangan 88,05%.

Rendahnya realisasi keuangan disebabkan efisiensi belanja listrik dan internet.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dan SAPK yang online, dengan capaian kinerja 100%.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan adalah dalam rangka penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran oleh pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sebesar Rp. 2.750.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 2.750.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tabung pemadam kebakaran pada kantor Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian kinerja 100%.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah penyediaan jasa pihak ketiga akan tenaga kebersihan pada kantor Badan Kepegawaian Daerah. Pihak ketiga dimaksud diharapkan dapat menyediakan jasa tenaga kebersihan (*cleaning service*) sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 130.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 128.609.600,- atau capaian kinerja keuangan 98,93%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor, dengan capaian kinerja adalah 100%.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini dilakukan untuk menunjang seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 55.559.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 55.557.300,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan capaian kinerja 100%.

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 72.483.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 70.260.100,- atau capaian kinerja keuangan 96,93%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya barang-barang cetak seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya penggandaan untuk pelaksanaan kegiatan BKD yang akan menunjang pelayanan administrasi perkantoran, dengan capaian kinerja 100%.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah dalam rangka menunjang aktivitas perkantoran melalui penggantian komponen-komponen instalasi listrik. Alat-alat listrik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 9.623.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 9.622.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat dan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja 100%.

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah penyediaan alat-alat penunjang seluruh aktivitas kantor agar berjalan lancar.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.105.923.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.073.790.000,- atau capaian kinerja keuangan 97,09%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah 15 unit Rool peg, 2 unit mesin penghancur kertas, 14 unit AC, 2 unit vacuum cleaner, 5 unit tabung pemadam, 1 unit TV,

bendera dan spanduk yang akan meningkatkan kenyamanan kerja PNS BKD, dengan capaian kinerja 100%.

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah. Dengan bertambah wawasan aparatur, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan lebih baik.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 21.926.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 19.495.000,- atau capaian kinerja keuangan 88,91%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk langganan surat kabar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur, dengan capaian kinerja 100%.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah dalam rangka menunjang seluruh kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah. Penyediaan makanan dan minuman disediakan terhadap pelaksanaan rapat-rapat rutin ataupun rapat koordinasi dengan tamu.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 30.400.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 24.780.000,- atau capaian kinerja keuangan 81,51%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya makan minum untuk penyelenggaraan rapat-rapat rutin kantor dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian, dengan capaian kinerja 100%.

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang didasarkan kepada surat perintah tugas dalam rangka menghadiri undangan rapat/workshop maupun koordinasi dan konsultasi dengan instansi dalam daerah maupun luar daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah sebesar Rp. 809.507.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 738.059.037,- atau capaian kinerja keuangan 91,17%.

Dari kegiatan ini tersedia dana untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah, sedangkan untuk capaian kinerja adalah sebesar 100%.

12. Penyediaan Jasa Sopir

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Sopir sebesar Rp.77.232.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.72.385.600,- atau capaian kinerja keuangan 93,72%.

Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan jasa tenaga sopir untuk kendaraan operasional BKD sebanyak 2 orang dari tenaga outcourcing dan 1 (satu) orang dari honorer, dengan capaian kinerja 100%.

13. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor dilaksanakan dengan pihak ketiga sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor sebesar Rp. 179.712.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 175.687.500,- atau capaian kinerja keuangan 97,76%.

Adapun dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan pengadaan tenaga pengaman kantor dengan Pihak Ketiga sebanyak 6 (enam) orang, dari kegiatan ini akan meningkatkan keamanan kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja adalah sebesar 100%.

14. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sebesar Rp. 16.500.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 13.000.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 78,79%.

Realisasi dari kegiatan ini berdasarkan peliputan-peliputan bidang kepegawaian yang dilakukan media cetak/elektronik, dengan capaian kinerja 100%.

15. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp. 16.400.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 12.100.000,- atau capaian kinerja keuangan 73,78%.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan senam dan wirid untuk PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan ini karena terdapat efisiensi belanja wirid.

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 1.057.739.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 901.803.615,- atau capaian keuangan sebesar 85,26%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pada BKD, dengan capaian fisik 100%.

1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp. 422.900.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 352.553.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 83,37%. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi dilaksanakan melalui lelang, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan kontrak pihak ketiga.

Dari kegiatan ini diperoleh 4 unit PC, 3 unit laptop, 7 unit printer, 2 unit scanner dan 2 unit server yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 40.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 39.841.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,60%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 46.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 31.655.615,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 68,82%, realisasi keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sesuai dengan kebutuhan selama tahun berjalan.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (2 unit mobil dan 2 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 28.600.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 23.777.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 83,14%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelieer

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelieer sebesar Rp. 12.250.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 12.250.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan meubelieer kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp. 30.250.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 29.660.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 98,05%.

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sehingga mewujudkan kinerja yang baik, dengan capaian Kinerja 100%.

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan sebesar Rp. 26.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 25.530.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,19%.

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telepon dan air, dengan capaian Kinerja 100%.

8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD sebesar Rp. 63.582.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 55.300.400,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 86,97%.

Pada kegiatan ini diharapkan keluaran laporan pengelolaan asset SKPD sehingga terwujudnya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD, dengan capaian Kinerja 100%.

9. Penataan dan Pengelolaan Arsip

Kegiatan penataan dan pengelolaan arsip sebesar Rp. 14.084.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 14.005.600,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,44%.

Pada kegiatan ini diharapkan keluaran berupa kelengkapan kearsipan sehingga terwujudnya penataan dan pengelolaan arsip yang tertib, dengan capaian Kinerja 100%.

10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sebesar Rp. 374.073.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 317.231.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 84,80%.

Pada kegiatan ini terlaksana keluaran berupa rehab gedung kantor, dengan capaian Kinerja 100%.

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebesar Rp. 42.081.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 42.081.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 85 orang, dengan capaian kinerja 100%.

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.24.850.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 17.935.950,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 72,18%.

Kegiatan ini telah melakukan pengiriman PNS pada Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Bintek Kepegawaian ke BKN, Kemendagri, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya profesional PNS di bidangnya, dengan capaian kinerja 100%.

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah berupa penyusunan laporan capaian kinerja bulanan dan triwulan, penyusunan Penetapan Kinerja (PK), penyusunan bahan LKPJ Gubernur, LPPD dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta laporan capaian kinerja lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 29.512.000,- dan

dapat direalisasi sebesar Rp. 26.512.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 89,83%.

Hasil dari kegiatan ini tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%. Rendahnya realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan ini karena terdapat sisa anggaran dari belanja honorarium operator Simbangda.

2. Penatausahaan Keuangan SKPD

Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa penatausahaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar Rp. 263.825.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 245.410.600,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 93,02%.

Dana kegiatan ini digunakan untuk honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (PA, KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara).

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan output berupa laporan keuangan akhir tahun, semester dan bulanan yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/ Kegiatan SKPD

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD adalah berupa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA, DPA dan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD sebesar Rp. 41.988.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 41.759.665,- atau dengan capaian Kinerja keuangan adalah sebesar 99,46%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian Kinerja 100%.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat bertugas melaksanakan manajemen kepegawaian yang salah satunya adalah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ini merupakan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pelaksanaan proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 2 (dua) periode yaitu Periode April dan Periode Oktober.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 333.871.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 312.800.100,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 93,69%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan kenaikan pangkat PNS direncanakan sebanyak 2500 SK, dan terealisasi sebanyak 2870 SK dengan tingkat capaian kinerja sebesar 114,80%. Capaian kinerja ini di atas target yang ditetapkan.

2. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 71.338.600,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp. 69.219.000,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 97,03%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil direncanakan sebanyak 400 Surat Keputusan terealisasi sebanyak 375 Surat Keputusan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,75%.

3. Pengelolaan Mutasi Jabatan

Dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier serta peningkatan mutu kepemimpinan dan jabatan struktural, maka untuk menjamin

kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural maka perlu dilakukan penilaian oleh suatu tim yaitu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan guna memberikan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.

Untuk tercapainya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat pejabat struktural, serta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu pejabat Pembina kepegawaian dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan sebesar Rp. 175.257.100,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 161.902.400,- atau 92,38%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengisian jabatan sesuai kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN

Kebutuhan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kader Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyelenggara pemerintahan di masa yang akan datang. Penerimaan Calon Praja IPDN harus dilaksanakan secara objektif, terbuka dan transparan, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan atau daerah. Dalam upaya mendapatkan Sumber Daya Manusia Calon Praja IPDN yang berkualitas, maka dilakukan beberapa tahap seleksi yang diawali dengan pendaftaran secara *online* di seluruh Indonesia dengan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi melalui sistim *online*;
2. Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem CAT dilaksanakan di Provinsi;
3. Seleksi kesehatan (dilaksanakan di Provinsi);
4. Seleksi kesamaptaan (dilaksanakan di Provinsi);
5. Tes psikologi dan tes integritas dan kejujuran (dilaksanakan di Provinsi);
6. Seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir) dilaksanakan di IPDN Jatinangor Jawa Barat.

Seleksi penerimaan CPNS Calon Praja IPDN menggunakan sistim GUGUR, yaitu peserta seleksi dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap sebelumnya. Semua hasil per tahap tes diumumkan secara online oleh Panitia Pusat dengan website www.ipdn.ac.id.

Dari 1232 orang yang mengikuti seleksi awal (target 1100 orang) dapat dikirim sebanyak 30 orang untuk mengikuti pendidikan Praja IPDN, dengan capaian kinerja output sebesar 112%. Capaian kinerja kegiatan ini rendah, disebabkan faktor eksternal yaitu:

- Target peserta seleksi di atas target yang ditetapkan (target 1100 orang, realisasi 1232 orang);
- Realisasi peserta yang lulus 30 orang (jumlah penerimaan ditentukan oleh kuota dari pusat).

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN sebesar Rp. 282.653.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 281.009.950,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,42%.

5. Pemindahan dan Penempatan PNS

Kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi pindah dan penempatan PNS yaitu:

1. Pindah antar kabupaten/kota
2. Pindah dari provinsi ke kabupaten/kota
3. Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi
4. Pindah di lingkungan provinsi sumbar
5. Pndah dari kabupaten/kota ke provinsi lain
6. Pndah dari provinsi lain ke kabupaten/kota
7. Pindah dari provinsi sumbar ke provinsi lain
8. Pindah dari provinsi lain ke provinsi sumbar

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemindahan dan Penempatan PNS sebesar Rp. 64.899.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 58.425.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 90,02%.

Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang dipindahkan dan ditempatkan direncanakan sebanyak 1000 orang dan dapat direalisasi sebanyak 829 orang dengan tingkat capaian kinerja 82,90%.

6. Pembinaan Jabatan Fungsional PNS

Tujuan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS ini adalah terlaksananya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, pemberhentian/pemberhentian sementara PNS dalam jabatan fungsional kenaikan pangkat/jabatan PNS sesuai dengan angka kredit kenaikan jabatan dan dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional telah diserahkan kepada Kepala SKPD masing-masing Jabatan Fungsional sesuai KEPMENPAN Jabatan fungsional tersebut.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS sebesar Rp. 33.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 31.481.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,11%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan angka kredit yang akurat direncanakan sebanyak 400 orang, dan dapat direalisasi sebanyak 400 orang dengan tingkat capaian kinerja 100%. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat pejabat fungsional dapat terlaksana tepat waktu.

8. Pemetaan Potensi Pegawai

Kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi Pegawai Negeri Sipil sehingga penempatan Pegawai Negeri Sipil pada satu bidang tugas sesuai dengan kompetensinya sehingga pencapaian target yang ditetapkan akan maksimal.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai adalah sebesar Rp. 160.703.400,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 142.755.600,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88,83%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai potensi pegawai melalui pemetaan potensi dengan target untuk 230 orang, realisasi 230 orang, maka capaian kinerja adalah 100%.

9. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Pemilihan PNS berprestasi adalah dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan semangat kerja, pengabdian dan prestasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. Dengan memberikan penghargaan kepada PNS yang terpilih diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian serta dapat menjadi contoh bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk:

1. Menciptakan kompetisi yang sehat antara Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal.
2. Mendorong, memotivasi Pegawai Negeri Sipil meningkatkan aktivitas, kreativitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas.

Penilaian PNS berprestasi meliputi tes tertulis, wawancara dan peninjauan lapangan, dengan faktor-faktor yang dijadikan objek penilaian :

- a. Capaian rencana kerja dan realisasi
- b. Disiplin
- c. Tingkat pengabdian
- d. Kesesuaian lapangan prestasi kerja dengan kenyataan lapangan
- e. Kejujuran
- f. Kemampuan teknis
- g. Kerjasama
- h. Tertib administrasi

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi sebesar Rp. 254.120.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 253.589.450,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,79%.

Dari kegiatan ini, telah dilakukan pemberian penghargaan untuk PNS berprestasi sebanyak 4 orang, dengan capaian kinerja 100%.

10. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari Penilaian Kinerja PNS adalah dalam rangka peningkatan kinerja PNS, peningkatan efektivitas capaian target kinerja dan pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara maksimal serta peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penilaian kinerja ini mengadopsi metode penilaian 360 derajat, dimana seorang PNS dinilai oleh beberapa penilai yang terdiri dari atasan langsung, teman selevel dan bawahannya dengan menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup (alternatif jawaban telah disediakan).

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PNS sebesar Rp. 120.238.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 118.685.400,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,71%.

Hasil dari kegiatan ini tersedianya laporan penilaian kinerja pejabat struktural dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target 1000 orang, realisasinya 1129 orang, maka capaian kinerja adalah 112,90%.

Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas ke dalam daerah (UPTD di kabupaten/kota) karena penilaian kinerja dilaksanakan di SKPD induk.

11. Bimbingan Teknis Kepegawaian

Kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Materi Bimbingan Teknis tahun 2016 ini adalah Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian sebesar Rp. 72.629.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 70.374.100,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,89%.

Hasil dari kegiatan ini terlaksananya bimbingan teknis kepegawaian terhadap 100 orang PNS Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja 100%.

12. Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II PNS

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.1 (Gol. Ruang II/d) dan Penata Tk.1 (Gol. Ruang III/d) untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus lulus Ujian Dinas.

Ujian Dinas dibagi dalam 2 tingkat yaitu:

1. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk.1 (Gol. Ruang II/d) menjadi Penata Muda (Gol Ruang III/a).
2. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.1 (Gol. Ruang III/d) menjadi Pembina (Gol Ruang IV/a).

Tahun 2016 dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sebesar Rp. 19.380.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 19.366.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,93%.

Pada tahun 2016 ini, jumlah PNS Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Ujian Dinas Tk.1 sebanyak 50 orang dan lulus 41 orang sedangkan yang mengikuti Ujian Dinas Tk.II sebanyak 12 orang dan lulus 12 orang, jadi dari 40 PNS yang ditargetkan lulus Ujian Dinas adalah 53 orang dengan tingkat capaian kinerja 132,50%.

13. Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS

Kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Negeri Padang.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp. 96.964.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 92.393.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,29%.

Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tahun 2016 sebanyak 159 orang dari 80 orang yang ditargetkan (capaian kinerja 198,75%). Namun yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 115 orang, dan artinya hanya 48 orang tersebut yang memenuhi persyaratan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Pembekalan PNS Purna Tugas

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang akan purna tugas di bidang kewirausahaan.
2. Menumbuhkan semangat berwiraswasta dan rasa percaya diri bagi PNS purna tugas sehingga mereka tetap merasa mampu dan produktif setelah memasuki masa pensiun.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembekalan PNS Purna Tugas adalah sebesar Rp. 64.527.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 63.815.700,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,90%.

Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS yang akan memasuki purna tugas sebanyak 25 orang, dengan capaian kinerja 100%.

15. Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan kepada PNS atas jasa-jasanya yang bertujuan sebagai pendorong/memotivasi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan selama 10 tahun (berwarna perunggu), 20 tahun (berwarna perak) dan 30 tahun (berwarna emas) Jumlah PNS yang telah mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada 2016 sebanyak 399 orang (target 300 orang), capaian kinerja sebesar 133%.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebesar Rp. 61.333.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 60.943.800,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,37%.

16. Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur

Sumber daya aparatur yang terbaik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam upaya penyediaan sumber daya aparatur tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat yang berminat dan memenuhi kriteria yang ditentukan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya APBD.

Kegiatan Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini terdiri dari pemberian beasiswa pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar dan program baru dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pihak ketiga serta Dana *Cost Sharing* (APBN dan APBD).

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur sebesar Rp. 523.8840.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 501.779.506,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,78%. Capaian kinerja keuangan untuk PNS yang mengikuti tugas belajar di perguruan tinggi sesuai target yang direncanakan.

Kegiatan ini merupakan penyediaan dana bagi PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri dengan dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Program pendidikan yang diikuti PNS tugas belajar tersebut antara lain:

- S2 : 17 orang (lanjutan APBD dan cost sharing)

Target PNS yang mengikuti pendidikan tahun 2016 adalah 17 orang, realisasi 17 orang (lanjutan APBD dan cost sharing), dengan capaian kinerja 100%.

17. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja. Namun kenyataannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tetap ada dan butuh proses untuk penanganannya sesuai aturan yang berlaku.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar Rp. 97.616.000,- dan dapat

direalisasi sebesar Rp. 87.886.900,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 90,03%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari 6 kali sidang MPP yang telah dilaksanakan dihasilkan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 50 orang (ringan 14 orang, sedang 16 orang, berat 20 orang), izin perceraian 19 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

18. Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

Kegiatan Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian adalah menyusun dan merancang peraturan bidang kepegawaian.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pengelolaan Dokumen/Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian sebesar Rp. 68.939.750,- terealisasi sebesar Rp. 64.590.750,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 93,69%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya aturan yang jelas dan tepat tentang kepegawaian.

19. Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai

Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai antara lain Karis, Karsu, KPE dan kartu identitas pegawai lainnya. Pengelolaan KPE berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik, dimana salah satu tujuan dari KPE adalah meningkatkan pelayanan kepada PNS. Kegiatan pengembangan KPE ini telah dirintis sejak tahun 2006 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan PT. SUCOFINDO (Persero) tentang Pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE dalam sistim layanan PNS.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai sebesar Rp. 44.580.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 43.307.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,14%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembuatan kartu identitas pegawai sebanyak 642 PNS (dari target 400 PNS) yaitu berupa Karpeg 406 PNS, Karis 170 PNS, Karsu 42 PNS, SK Konversi NIP 13 PNS dan KPE 11 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja 160,50%.

20. Pengelolaan SK CPNS, PNS dan Honorer Pemprov. Sumatera Barat

Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer merupakan salah satu bentuk pengaplikasian pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 54.320.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 50.138.400,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 92,30%.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya SK PNS dan Tenaga Honorer Provinsi Sumatera Barat dengan target 234 SK, realisasi SK PNS 170 SK dan tenaga honorer 85 SK dengan demikian capaian kerjanya adalah 108,97%.

21. Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Base kepegawaian daerah

Kegiatan Penataan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kelancaran dan efektivitas kegiatan administrasi perkantoran dalam suatu organisasi pemerintah baik secara elektronik maupun secara non elektronik.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penataan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian daerah adalah terwujudnya tata naskah kepegawaian yang teratur, rapi dan tertib juga terlaksananya up dating data base kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Base Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 145.341.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 143.385.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,65%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terkelolanya tata naskah Kepegawaian sebanyak 8000 file (target 8000 file, dengan capaian kinerja 100%) PNS di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

22. Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa untuk memilih orang yang baik dan ditempatkan pada atau melaksanakan pekerjaan yang tepat, harus disusun formasi pegawai dengan melakukan kegiatan perhitungan kebutuhan pegawai yang berdasarkan pada "Analisis Jabatan dan Beban Kerja" yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran harus menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi.

Maksud dari kegiatan Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah untuk menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi serta melakukan penyempurnaan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan data persediaan pegawai dalam rangka penyusunan formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar Tahun 2016 sebesar Rp. 85.637.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 82.810.501,- atau capaian keuangan sebesar 96,70%.

Kegiatan ini direncanakan untuk penyusunan formasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang akan menyediakan informasi kebutuhan pegawai yang akurat, dengan capaian kinerja 100%.

23. Rapat Koordinasi Kepegawaian

Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi antara Pengelola Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian sebesar Rp. 70.791.350,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 68.521.240,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,79%.

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Kota Sawahlunto dengan peserta Rakor

ini adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian kabupaten/kota dan SKPD Provinsi sebanyak 100 orang.

- Menghadiri Rakor Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang ke-II di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Dari Rakor ini diperoleh kesepakatan antara Provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian

Dari hasil diatas, maka capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena adanya sisa anggaran dari belanja akomodasi narasumber, makan minum kegiatan, karena kegiatan tidak dilaksanakan di hotel (kegiatan dilaksanakan di kantor BKD).

24. Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan melakukan pembinaan administrasi kepegawaian, khususnya pelayanan di bidang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil agar pelayanan efisien, efektif, berkeadilan dan transparan, hal ini mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka reformasi administrasi kepegawaian harus profesional dan tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan pegawai yang dilayani. Maksud dari pelaksanaan Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS khususnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat adalah untuk mempermudah, mempercepat proses usul persyaratan kenaikan pangkat dari golongan I/a sampai ke golongan IV/b.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota se-Sumatera Barat tepat pada waktunya.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp. 29.850.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 29.820.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,90%.

Kegiatan ini merupakan pembinaan kepada 19 Kabupaten/Kota agar terwujud penetapan kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu, dengan capaian kinerja 100%.

25. Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)

Kegiatan Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) bertujuan untuk meningkatkan potensi diri dengan adanya motivasi dorongan yang kuat dalam diri PNS dalam bekerja.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) sebesar Rp. 42.521.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 41.771.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,24%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) bagi aparatur di lingkungan Pemprov Sumbar sebanyak 25 orang.

26. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PNS pada unit dan organisasi dan sebagai pedoman bagi setiap PNS, pejabat penilai dan pejabat lain yang berkepentingan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja untuk kemajuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebesar Rp. 41.923.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 41.814.200,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,74%.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja di lingkungan Pemprov Sumbar dengan tingkat capaian kinerja 100%.

27. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG) bertujuan untuk terwujudnya data dan profil PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk pengelolaan SDM aparatur dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

Kegiatan ini meliputi:

1. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian SKPD
2. Sosialisasi penggunaan sistem informasi pelayanan kepegawaian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3. Pembuatan laporan tahunan kegiatan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG) sebesar Rp. 153.613.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 149.105.800,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 97,07%.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya 1 (satu) program aplikasi tata naskah kepegawaian dengan tingkat capaian kinerja 100%.

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan target yang direncanakan.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Sumatera Barat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 29 Desember 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

JAYADISMAN, SH, M.Kn

Pembina Utama Madya

NIP. 19571227 198303 1 006